


 COMMUNITY
SERVICE
PROGRESS

COMMUNITY SERVICES PROGRESS

EISSN : 2962-0422

www.journal.stie-binakarya.ac.id

Pendampingan Penganggaran dan Pengawasan Keuangan pada UMKM dan NGO Binaan

Khairunnisa^{1*}, Wiwin Aminah¹, Ali Riza Fahlevi¹, Fajra Arfitsa¹, Anjeliena Qodrio¹
Telkom University¹

Email: khairunnisa@telkomuniversity.ac.id*

ABSTRACT

Budgeting and oversight are essential for ensuring the sustainability and effectiveness of non-profit organizations (NGOs). This process includes thorough financial planning, strategic resource allocation, and careful monitoring to guarantee that funds are used to support the organization's mission. In the budgeting process, the involvement of various stakeholders—such as the board of directors, executive directors, financial managers, and program heads—is crucial for creating a realistic budget that meets the organization's needs. Additionally, effective budget oversight is vital for ensuring transparency, accountability, and efficiency, which are core values in NGO management. A practical approach to budgeting involves identifying strategic priorities, projecting revenues, and evaluating expenditures in relation to the organization's programs and operations. Good budget oversight includes monitoring progress, analyzing the discrepancies between planned and actual results, and implementing corrective measures when necessary. With effective budget management, NGOs can enhance their credibility in the eyes of donors, ensure the smooth implementation of programs, and reduce financial risks that could impede the achievement of their goals. This study highlights the significance of a transparent and accountable budgeting and oversight system in promoting the sustainability and effectiveness of NGOs. In conclusion, an integrated and data-driven approach to budget preparation and monitoring strengthens financial governance and enhances the social impact of the programs implemented.

Keywords: accountability, budget preparation, financial governance, monitoring, NGO, transparency.

ABSTRAK

Penyusunan dan pengawasan anggaran merupakan elemen penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasi organisasi nirlaba (NGO). Proses ini melibatkan perencanaan keuangan yang komprehensif, pengalokasian sumber daya yang strategis, serta pemantauan yang cermat untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan misi organisasi. Dalam penyusunan anggaran, keterlibatan berbagai pihak, termasuk dewan pengurus, direktur eksekutif, manajer keuangan, dan kepala program, menjadi kunci untuk menghasilkan anggaran yang realistis dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Sementara itu, pengawasan anggaran berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,

yang merupakan nilai fundamental dalam pengelolaan NGO. Pendekatan yang efektif dalam penyusunan anggaran meliputi identifikasi prioritas strategis, proyeksi pendapatan, dan evaluasi pengeluaran berdasarkan program dan operasional organisasi. Pengawasan anggaran yang baik melibatkan pemantauan rutin, analisis kesenjangan antara rencana dan realisasi, serta penerapan tindakan korektif yang diperlukan. Dengan manajemen anggaran yang baik, NGO dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata donatur, memastikan kelancaran pelaksanaan program, serta memitigasi risiko keuangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sistem penyusunan dan pengawasan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas NGO. Kesimpulan, penyusunan dan pengawasan anggaran yang terintegrasi dan berbasis data tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan dampak sosial dari program yang dijalankan.

Kata kunci: akuntabilitas, NGO, penyusunan anggaran, pengawasan anggaran, tata kelola keuangan, transparansi.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman budaya, politik dan geografis yang melahirkan banyak kepentingan. *Non-Governmental Organizations* (NGO) memiliki peran yang sangat penting sejak awal abad 20 dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi perubahan sosial (Wardani, 2024). Pertumbuhan jumlah NGO semakin menguatkan pentingnya peran NGO sehingga tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi semakin besar (Marshall & Suárez, 2014). Pada tahun 2021, kota Bandung memiliki total NGO sebanyak 370 institusi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021).

Sebagai sebuah organisasi, proses akuntansi manajemen dalam organisasi harus tetap berjalan agar dapat mempertahankan kontinuitas organisasi sektor publik. ISAK 35 menjelaskan bahwa organisasi non laba merupakan entitas yang berorientasi untuk tidak memperoleh laba, yaitu entitas yang ruang lingkupnya fokus pada pelayanan masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat (Fitri et al., 2023). Perbedaan utama dari organisasi non laba terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Pengguna laporan keuangan organisasi non laba secara umum memiliki kepentingan untuk menilai cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Penelitian Suhariyani & Ahmad (2023) menunjukkan bahwa entitas non laba ini merupakan tempat yang mudah untuk berbuat kecurangan. Praktik kecurangan yang sering kali terjadi berupa manipulasi transaksi keuangan sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian internal.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Syukur et al., 2022). Penelitian Sholihin et al. (2021) menunjukkan bahwa anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan topik, penganggaran serta pengawasan NGO di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Yanuarisa (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) macam, yakni:

1. Akuntabilitas Vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas tertinggi.
2. Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga setara.

Indikator Akuntabilitas

Tiaravita & Hasyir (2024) menguraikan indikator akuntabilitas yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengukur akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam penyelenggaraan
2. Sistem pengawasan
3. Mekanisme pertanggungjawaban
4. Laporan tahunan
5. Mekanisme evaluasi *reward and punishment*

Anggaran sebagai Alat Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi (Nurdiansyah, 2012). Pengendalian anggaran adalah proses pengendalian kegiatan dengan menggunakan anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif, jika dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif akan menyebabkan pemborosan dana dan waktu.

Proses sistem pengendalian manajemen dilakukan dalam 6 (enam) tahap: (1) Perumusan strategi; (2) Perencanaan Strategik; (3) Penyusunan Strategik; (4) Penyusunan Program; (5) Implementasi; dan (6) Pengendalian. Pengendalian menurut Suadi (1995) dapat dilihat menggunakan 2 (dua) aspek, yaitu: struktur pegendalian manajemen serta, pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi serta proses pengendalian manajemen tugas, pelaporan dan kompensasi bagi manajemen.

METODE

Metode Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan *workshop* dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktik penganggaran dan pengawasan pada NGO. *Workshop* menurut Suprijanto dalam Purnama (2022) mengungkapkan bahwa *workshop* memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran lain, karena *workshop* memungkinkan adanya kerja sama dalam kelompok kecil dengan permasalahan yang

sama. Dalam *workshop* juga peserta diberikan penjelasan yang luas tentang permasalahan yang dihadapi, dilatih berpikir, dan bersikap ilmiah, mendapat petunjuk yang mudah untuk mengerjakan tugas, dan latihan berkolaborasi dengan orang lain. Setelah *workshop*, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan pendampingan dengan tujuan agar NGO mempraktikkan materi yang telah diberikan pada saat *workshop*. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan menggunakan nomor *hotline* melalui aplikasi *whatsapp*. Umpan balik metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan template kuesioner yang sudah disiapkan oleh Universitas Telkom. Kuesioner yang bersifat tertutup dengan menggunakan Skala Likert.



Gambar 1. Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom

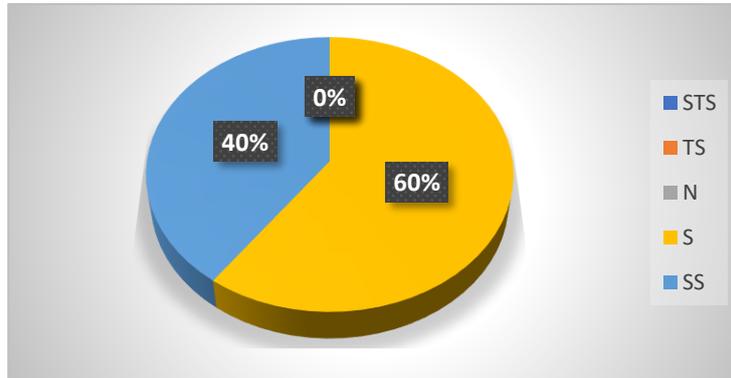
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa kuesioner yang diberikan kepada peserta *Workshop* Penganggaran serta Pengawasannya. Kuesioner menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang praktik penganggaran dan pengawasan pada NGO yang beroperasi di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umpan Balik terhadap Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Umpan Balik Hasil Pengabdian Masyarakat diukur dengan memberikan kuesioner dengan indikator sebagai berikut: (1) Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta; (2) Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup; (3) Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami; (4) Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan; dan (5) Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan dimasa yang akan datang. Indikator ini diukur dengan menggunakan Skala Likert dengan kategori Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Hasil umpan balik dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Umpan Balik Kegiatan Pengabdian Masyarakat

60% peserta menyatakan setuju/puas dengan materi, waktu pelaksanaan, dan metode pembelajaran berupa *workshop* yang dilakukan oleh tim pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Identifikasi NGO Kota Bandung

Untuk membantu memberikan gambaran tentang praktik anggaran NGO di Kota Bandung diperoleh hasil sebagai berikut:



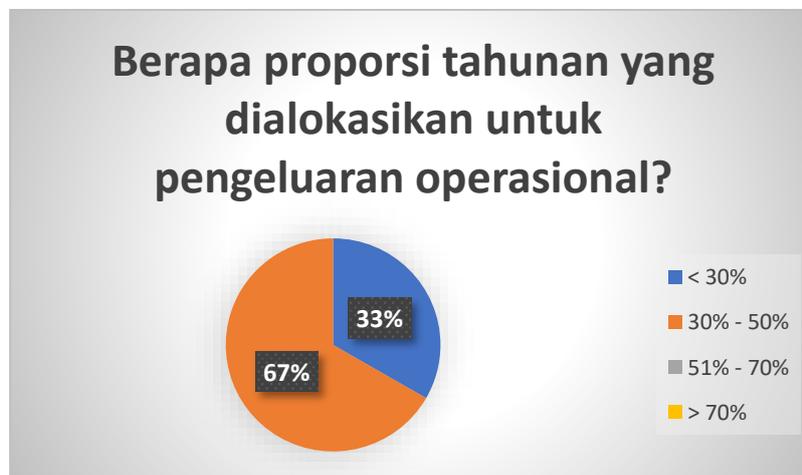
Gambar 3. NGO dan Anggaran

Seluruh NGO yang menjadi peserta *workshop* telah memiliki anggaran. Fungsi anggaran dalam NGO lebih dari sebuah metode keuangan; anggaran menjadi dasar untuk perencanaan strategis, efisiensi operasional, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang bijak. Dengan anggaran yang baik, NGO dapat mencapai tujuan sosialnya dengan lebih efektif dan berkelanjutan.



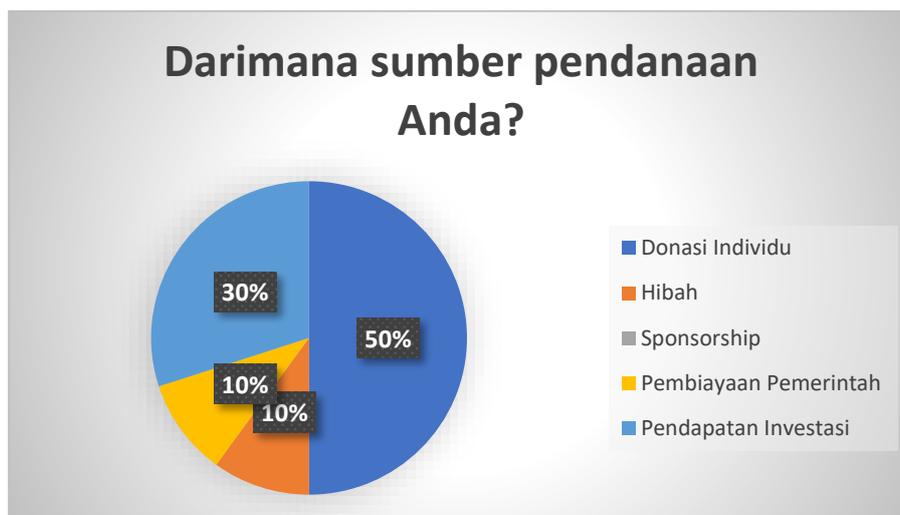
Gambar 4. Penanggungjawab Penyusunan Anggaran NGO

Penyusunan anggaran adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan anggaran mencerminkan misi, visi, dan kebutuhan operasional organisasi. Meskipun banyak pihak yang terlibat, direktur eksekutif merupakan pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam memimpin proses penyusunan anggaran. Namun, keberhasilan anggaran bergantung pada kerja sama antara manajemen, dewan pengurus, dan tim operasional. Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan penyusunan anggaran masih didominasi oleh dewan pengurus NGO.



Gambar 5. Proporsi Alokasi Anggaran untuk Operasional NGO

Proporsi anggaran untuk operasional NGO harus mencerminkan misi organisasi, kebutuhan masyarakat, dan efisiensi pengelolaan dana. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk program utama, dengan tetap mempertahankan sistem pendukung yang memadai.



Gambar 6. Sumber Pendanaan NGO

Sumber pendanaan NGO dapat diperoleh dari donasi individu, hibah, kemitraan dengan perusahaan, pendapatan dari kegiatan atau jasa, *crowdfunding*, *endowment funds*, kampanye *fundraising*, pendanaan pemerintah, dukungan *in-kind*, investasi sosial, dan kerjasama internasional. NGO yang menjadi peserta *workshop* masih mengandalkan donasi individu. Oleh karena itu, sebaiknya NGO melakukan strategi diversifikasi untuk sumber pendanaan agar mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber, meningkatkan stabilitas keuangan, dan memastikan keberlanjutan program.

KESIMPULAN

Pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung kelancaran operasional, tetapi juga memperluas cakupan, efektivitas, dan keberlanjutan aktivitas organisasi NGO. Dengan anggaran yang direncanakan dan diawasi secara efektif, NGO dapat memaksimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan misinya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik dengan kerja sama yang baik dari tim pelaksana, dukungan dari program studi, fakultas, Universitas Telkom serta masyarakat sasaran NGO yang berada dalam binaan PT. Fosterian Eskalasi Indonesia.

REFERENSI

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (2021). Organisasi Masyarakat di Kota Bandung. Open Data Kota Bandung.
- Fitri, S. A., Fadillah, N., & Agusti, M. D. (2023). Akuntansi Organisasi Laba. Sada Kurnia Pustaka.
- Marshall, J. H., & Suárez, D. (2014). The Flow of Management Practices: An Analysis of NGO Monitoring and Evaluations Dynamics. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 43(6), 1033–1051.
- Nurdiansyah, D. H. (2012). Analisis Sistem Penganggaran serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Yayasan As-Syifa. *Manajerial*, 10(20), 82–94.

- Purnama, B. J. (2022). Workshop Teknik Kelompok sebagai Strategi Efektif Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Instrumen Penilaian. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(3), 308–316.
- Sholihin, M. K., Pituriningsih, E., & Surasni, N. K. (2021). The Effect of Participatory Budgeting, Internal Control Systems, Ethical Behavior of Leaders and Organizational Culture on Public Accountability. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JSIP)*, 5(3), 338–347.
- Suadi, A. (1995). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Suhariyani, A., & Ahmad, A. (2023). Mendalami Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan sebagai Entitas Berorientasi Nonlaba. *Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 11–21.
- Syukur, S. R., Mus, A. R., & Lanani, D. (2022). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 459–476.
- Tiaravita, D., & Hasyir, D. A. (2024). Analisis Penerapan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Keuangan serta Sistem Akuntansi berupa Kualitas Laporan Keuangan Berbasik ISAK 35 pada NGO Bidang Kemanusiaan . *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(12), 798–804.
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 4(9), 669–679.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan . *Balance*, 12(2).